

**ANALISIS WACANA KRITIS TERHADAP PERNYATAAN DEDI  
MULYADI TENTANG PENGHAPUSAN WISUDA SEKOLAH:  
PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH**

**Yosua Asa Firdaus**

Program Studi Ilmu Komunikasi,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia  
[yosuaasaf@gmail.com](mailto:yosuaasaf@gmail.com)

**Hadi Firman**

Program Studi Ilmu Komunikasi,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Seiring perkembangan zaman, ritual wisuda semakin sarat dengan muatan simbolik yang terkait dengan status sosial dan kebanggaan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pernyataan Dedi Mulyadi dengan mengidentifikasi representasi teks, pola produksi dan konsumsi wacana, serta konteks sosial budaya yang melatarinya, guna mengungkap ideologi, relasi kekuasaan, dan dinamika sosial yang terkandung dalam wacana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah merepresentasikan relasi kuasa, resistensi terhadap simbolisme pendidikan, serta kritik terhadap praktik pendidikan yang sarat dengan beban ekonomi.

**Kata Kunci:** *Pendidikan, Sekolah, Wisuda, Dedi Mulyadi*

**ABSTRACT**

Education is one of the main foundations for a nation's progress. In Indonesia, education not only functions as a means of transferring knowledge but also serves as a platform for character building and the inculcation of national values. Along with the changing times, graduation rituals have become increasingly laden with symbolic meanings related to social status and family pride. This study aims to critically analyze Dedi Mulyadi's statement by identifying textual representations, patterns of discourse production and consumption, as well as the socio-cultural context behind it, in order to uncover the ideologies, power relations, and social dynamics embedded in the discourse. This research employs a descriptive qualitative approach using Norman Fairclough's critical discourse analysis method. The findings of this study indicate that Dedi Mulyadi's statement regarding the abolition of school graduation ceremonies represents power relations, resistance to educational symbolism, and criticism of educational practices burdened by economic costs.

**Keywords:** *Education, School, Graduation, Dedi Mulyadi*

## **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan (Barus et al., 2023). Sejalan dengan pentingnya pendidikan, ritual wisuda hadir sebagai simbol keberhasilan siswa dalam menempuh jenjang pendidikan tertentu. Budaya wisuda di Indonesia sendiri mulai berkembang seiring dengan pengaruh sistem pendidikan Barat, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal (Ummami & Fauziah, 2023). Wisuda bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga sarat makna simbolik yang mencerminkan keberhasilan akademik, pengakuan sosial, dan harapan masa depan.

Seiring perkembangan zaman, ritual wisuda semakin sarat dengan muatan simbolik yang terkait dengan status sosial dan kebanggaan keluarga. Hal ini menjadikan wisuda sebagai ajang pertunjukan simbolik yang tidak jarang menimbulkan tekanan sosial bagi orang tua dan peserta didik. Dalam konteks ini, wisuda sekolah dasar hingga menengah bahkan kerap menuai kritik karena dianggap lebih menekankan aspek seremonial daripada esensi pendidikan itu sendiri (Rizqia & Asrofah, 2024). Fenomena ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk tokoh publik seperti Dedi Mulyadi, yang menyerukan penghapusan wisuda sekolah dengan alasan untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat.

Kajian terhadap wacana pendidikan dan ritual wisuda memerlukan analisis yang mendalam, salah satunya melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Salah satu model AWK yang banyak digunakan adalah model Norman Fairclough. Fairclough memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berhubungan erat dengan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial (Sumarti, 2010). Dalam konteks pendidikan, bahasa yang digunakan dalam diskursus publik, termasuk pernyataan tentang wisuda, tidaklah netral. Bahasa tersebut sarat dengan muatan ideologis yang mencerminkan relasi kekuasaan dan kepentingan tertentu.

Model analisis wacana Fairclough terdiri dari tiga dimensi utama: dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Dimensi ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, serta bagaimana teks tersebut membentuk dan dibentuk oleh tatanan sosial (Hamdan, 2019). Penerapan model ini, misalnya, telah digunakan dalam analisis wacana kurikulum merdeka yang menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan direpresentasikan dan memengaruhi opini publik (Barus et al., 2023).

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa analisis wacana kritis Fairclough efektif dalam mengungkap bias ideologi dalam media massa, buku teks, dan kebijakan pendidikan. Misalnya, Ummami & Fauziah (2023) mengungkap bagaimana narasi sejarah Orde Baru dalam buku teks IPS menonjolkan kekuasaan rezim tertentu melalui seleksi fakta yang tidak seimbang. Sementara itu, penelitian Urfa & Asrofah (2024) pada pemberitaan pembatalan kenaikan UKT menunjukkan bagaimana media membingkai citra positif terhadap pemerintah melalui konstruksi wacana tertentu.

Dalam konteks pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan wisuda sekolah, penting untuk melihat bagaimana wacana tersebut mencerminkan ideologi pendidikan tertentu. Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai pihak yang mengkritisi praktik pendidikan yang sarat simbolisme dan dinilai menjauh dari esensi pendidikan sejati. Wacananya mengandung pesan untuk menghapus beban ekonomi simbolik pada masyarakat, yang secara tidak langsung menantang norma sosial yang telah mapan (Kurniawan et al., 2021). Pernyataan Dedi Mulyadi juga dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan simbolik yang telah mengakar dalam praktik sosial masyarakat. Fairclough (1989) menyebutkan bahwa wacana dapat menjadi alat reproduksi kekuasaan dan ideologi (Sumarti, 2010). Dengan demikian, seruan penghapusan wisuda sekolah adalah wacana yang berupaya mendekonstruksi tatanan simbolik yang menempatkan wisuda sebagai indikator keberhasilan pendidikan.

Selain itu, wacana ini juga memunculkan dinamika tekanan sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menekankan simbol-simbol keberhasilan, penghapusan wisuda dapat dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi sosial sebagian pihak. Fairclough menekankan pentingnya mengkaji praktik sosiokultural dalam analisis wacana untuk memahami bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja di balik teks (Barus et al., 2023). Dengan demikian, pernyataan Dedi Mulyadi dapat dilihat sebagai upaya untuk menggeser struktur sosial terkait simbol keberhasilan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan wisuda sekolah direpresentasikan melalui dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural dalam perspektif analisis wacana kritis model Norman Fairclough, serta bagaimana wacana tersebut mencerminkan ideologi pendidikan, kekuasaan simbolik, dan tekanan sosial di masyarakat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pernyataan Dedi Mulyadi dengan mengidentifikasi representasi teks, pola produksi dan konsumsi wacana, serta konteks sosial budaya yang melatarinya, guna mengungkap ideologi, relasi kekuasaan, dan dinamika sosial yang terkandung dalam wacana tersebut.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Wacana Pendidikan dan Ritual Wisuda di Indonesia**

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa. Melalui pendidikan, terbentuk individu-individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan (Barus et al., 2023). Salah satu simbol keberhasilan dalam proses pendidikan formal di Indonesia adalah pelaksanaan wisuda. Wisuda bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi representasi pencapaian akademik sekaligus pengakuan sosial atas keberhasilan peserta didik dalam menuntaskan jenjang pendidikan tertentu (Ummami & Fauziah, 2023). Tradisi wisuda di Indonesia mulai dikenal seiring dengan masuknya sistem pendidikan modern pada masa kolonial dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan budaya masyarakat. Seiring waktu, wisuda tidak hanya dilihat sebagai bentuk apresiasi pendidikan, tetapi juga mengandung makna

simbolik yang erat kaitannya dengan status sosial, kebanggaan keluarga, serta eksistensi di lingkungan masyarakat.

Fenomena wisuda yang menyasar tingkat pendidikan dasar hingga menengah kerap memicu perdebatan. Sebagian kalangan mengkritik bahwa wisuda sekolah telah bergeser menjadi ajang formalitas dan simbolisme yang justru membebani masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis (Rizqia & Asrofah, 2024). Di sinilah pentingnya penelitian wacana untuk memahami bagaimana simbol-simbol pendidikan, seperti wisuda, dikonstruksi, dimaknai, dan dipertahankan dalam praktik sosial masyarakat.

## 2. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan pendekatan multidisipliner yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologi dan relasi kekuasaan (Fairclough, 1989 dalam Sumarti, 2010). Norman Fairclough mengembangkan model AWK dengan kerangka tiga dimensi, yakni analisis teks (deskripsi), praktik wacana (interpretasi), dan praktik sosiokultural (eksplanasi). Dimensi teks mengkaji struktur linguistik yang digunakan dalam wacana; praktik wacana menyoroti proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks; sedangkan praktik sosiokultural menelaah konteks sosial dan budaya yang membentuk dan dibentuk oleh wacana tersebut (Hamdan, 2019).

Pendekatan Fairclough telah banyak diterapkan dalam mengkaji wacana pendidikan, kebijakan publik, maupun media massa. Misalnya, penelitian Barus et al. (2023) terhadap wacana kurikulum merdeka menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan direpresentasikan melalui narasi tertentu yang membangun legitimasi pemerintah di mata publik. Penelitian Ummami & Fauziah (2023) pada buku teks sejarah mengungkap adanya bias ideologi yang tersembunyi di balik seleksi fakta sejarah, yang secara tidak langsung memperkuat kekuasaan simbolik rezim tertentu. Temuan ini mempertegas bahwa bahasa dalam wacana pendidikan tidak pernah bebas dari kepentingan ideologis.

## 3. Wacana, Ideologi, dan Kekuasaan Simbolik dalam Pendidikan

Wacana pendidikan, termasuk pernyataan tokoh publik mengenai kebijakan atau praktik pendidikan, sering kali mengandung ideologi tertentu yang berupaya membangun atau menantang tatanan sosial yang berlaku. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa wacana memiliki relasi dialektis dengan struktur sosial, di mana wacana dapat membentuk dan dibentuk oleh tatanan sosial yang ada (Hamdan, 2019). Dalam konteks wisuda sekolah, praktik ini dapat dilihat sebagai representasi kekuasaan simbolik, yang menempatkan individu dalam struktur sosial tertentu berdasarkan simbol keberhasilan akademik.

Pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan wisuda sekolah menjadi contoh wacana yang menantang hegemoni simbolik tersebut. Wacana ini berupaya mendekonstruksi pandangan bahwa wisuda adalah satu-satunya simbol keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini, pendekatan analisis wacana kritis membantu untuk mengungkap bagaimana pernyataan tersebut merefleksikan upaya perlawanan terhadap tekanan sosial dan dominasi simbolik yang telah mengakar dalam praktik pendidikan di Indonesia (Kurniawan et al., 2021).

#### 4. Penelitian Terdahulu Terkait Analisis Wacana Kritis dalam Pendidikan

Berbagai penelitian sebelumnya telah memanfaatkan model Fairclough untuk mengungkap ideologi tersembunyi dalam wacana pendidikan. Misalnya, Kurniawan et al. (2021) mengkaji wacana pendidikan di media daring dan menemukan bahwa media memiliki kecenderungan membangun opini publik yang sejalan dengan kepentingan tertentu. Urfa & Asrofah (2024) melalui penelitian terhadap wacana pembatalan kenaikan UKT juga menunjukkan bagaimana media merekonstruksi citra positif pemerintah dalam isu-isu sensitif di bidang pendidikan. Demikian pula, Ummami & Fauziah (2023) berhasil menunjukkan bahwa materi dalam buku teks IPS sarat dengan framing sejarah yang mendukung legitimasi kekuasaan masa Orde Baru.

#### **Kajian Teori**

##### **Teori Ideologi dalam Wacana**

Dalam analisis wacana kritis, ideologi dipandang sebagai seperangkat keyakinan atau gagasan yang berfungsi untuk mempertahankan, mereproduksi, atau menantang struktur kekuasaan dalam masyarakat (Fairclough, 1995). Bahasa sebagai bagian dari wacana digunakan untuk melegitimasi atau menolak kekuasaan. Oleh karena itu, setiap wacana dapat merepresentasikan dominasi simbolik, resistensi, atau pertarungan ideologi yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah dapat dilihat sebagai wacana perlawanan terhadap ideologi pendidikan yang sarat dengan simbolisme sosial. Teori ideologi ini menguatkan posisi penelitian untuk mengungkap bagaimana wacana tertentu (dalam hal ini pernyataan tokoh publik) berupaya memengaruhi struktur sosial, mengkritisi norma yang sudah mapan, dan menawarkan cara pandang baru terhadap praktik pendidikan.

##### **Teori Kekuasaan Simbolik (Pierre Bourdieu)**

Sebagai pelengkap, teori kekuasaan simbolik dari Pierre Bourdieu dapat digunakan untuk mendukung analisis dalam memahami bagaimana praktik wisuda berfungsi sebagai instrumen kekuasaan simbolik. Bourdieu menjelaskan bahwa simbol, tanda, dan praktik sosial tertentu berfungsi untuk mempertegas posisi dan relasi kekuasaan dalam masyarakat (Bourdieu, 1991). Wisuda sebagai simbol keberhasilan pendidikan adalah contoh bagaimana simbol digunakan untuk menegaskan hierarki sosial dan membangun citra status. Dalam kerangka analisis wacana kritis, teori kekuasaan simbolik membantu menjelaskan bagaimana wacana penghapusan wisuda menantang dominasi simbolik yang telah mengakar kuat dalam praktik sosial pendidikan.

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkap makna tersembunyi, relasi kekuasaan, dan ideologi di balik wacana pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah. Model analisis yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough, yang memandang bahasa sebagai praktik sosial yang berhubungan erat dengan struktur sosial dan kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana wacana dibentuk, diproduksi, dan

didistribusikan dalam ruang publik serta bagaimana wacana tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosiokultural masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini berupa teks pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan wisuda sekolah yang diperoleh dari berbagai sumber media daring, seperti berita, artikel opini, dan unggahan media sosial yang relevan dengan topik penelitian. Selain teks utama, data pendukung juga diambil dari komentar publik, tanggapan pihak terkait, dan liputan media yang memuat pernyataan atau interpretasi atas wacana tersebut. Sumber data ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana wacana terbentuk dan berinteraksi dengan publik.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model tiga dimensi yang dikemukakan oleh Fairclough, yaitu: (1) analisis teks, yang menyoroti aspek kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat; (2) analisis praktik wacana, yang mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, termasuk siapa aktor-aktor yang terlibat dan kepentingannya; serta (3) analisis praktik sosiokultural, yang membedah konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut serta dampaknya terhadap struktur sosial yang ada.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini, memaparkan hasil analisis wacana kritis terhadap pernyataan Dedi Mulyadi mengenai larangan kegiatan wisuda di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Norman Fairclough, yakni analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.

##### **1) Analisis Teks**

Analisis ini menggunakan dimensi yang pertama dalam teori Norman Fairclough, yaitu analisis teks. Analisis ini akan menganalisis disetiap teks, kata yang di ucapkan oleh Kang Dedi Mulyadi.

##### **Pernyataan 1:**

*“Saya melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda, karena wisuda itu menurut saya cocoknya SI atau Diploma 3. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, nah ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi,”*

Pernyataan Dedi Mulyadi terkait larangan wisuda sekolah menunjukkan pemilihan kata yang khas dan sarat makna kuasa. Kata “*melarang*” digunakan untuk menegaskan posisi Dedi Mulyadi sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan terkait aktivitas di sekolah. Pilihan kata ini mengandung relasi kuasa yang kuat karena secara langsung menunjukkan sikap mengatur atau membatasi. Selain itu, kata “*cocoknya*” dalam pernyataan “*menurut saya cocoknya SI atau Diploma 3*” menunjukkan adanya subjektivitas dalam pandangan pembicara. Kata ini menekankan bahwa penilaian kelayakan wisuda didasarkan pada norma yang diyakini secara pribadi, bukan berdasarkan aturan atau kebijakan formal yang baku. Sementara itu, frasa “*biaya lagi, ribut lagi*” digunakan untuk membangun efek retorik, menekankan bahwa wisuda sekolah dianggap menambah beban, baik secara ekonomi maupun sosial.

Dari segi struktur kalimat, pernyataan Dedi Mulyadi terdiri dari kalimat kompleks dan kalimat majemuk yang menampilkan hubungan sebab-akibat. Kalimat pertama, *"Saya melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda, karena wisuda itu menurut saya cocoknya SI atau Diploma 3"*, menyusun argumen dengan pola tindakan dan alasan, sehingga secara logis mengaitkan larangan dengan alasan normatif yang diyakini.

**Pernyataan 2:**

*"Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,"*

*"Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,"* menunjukkan penggunaan pilihan kata dan struktur kalimat yang tegas, sederhana, dan repetitif. Pilihan kata *"sudah jelas"* mengandung makna bahwa larangan wisuda pada jenjang TK hingga SMA dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Frasa ini membingkai pernyataan sebagai kebenaran yang bersifat final, seolah-olah sudah menjadi kesepakatan bersama. Kata *"tidak boleh"* mempertegas posisi kuasa pembicara sebagai pihak yang menetapkan larangan. Ungkapan ini bersifat direktif, mengarahkan atau memerintah, sehingga menguatkan relasi kuasa antara pembicara dengan audiens.

Struktur kalimat yang digunakan didominasi kalimat pendek dan langsung ke intinya. Kalimat *"Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan"* menggunakan pengulangan kata untuk menegaskan bahwa cukup ada kegiatan formal berupa kenaikan kelas atau kelulusan tanpa perlu seremoni tambahan seperti wisuda. Repetisi ini tidak hanya berfungsi sebagai penekanan pesan, tetapi juga sebagai strategi agar pesan lebih mudah diingat dan diterima audiens.

**Pernyataan 3:**

*"Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,"*

Pernyataan Dedi Mulyadi, *"Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,"* memuat pilihan kata yang sarat makna kuasa dan menegaskan otoritas personal. Frasa *"Saya tidak akan mendengar siapa pun"* secara eksplisit menunjukkan sikap keras dan tertutup terhadap masukan atau kritik dari pihak lain. Pilihan kata ini menegaskan posisi pembicara sebagai figur berkuasa yang merasa berhak untuk mengambil keputusan secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh suara di luar dirinya. Kata *"yang penting"* menjadi penanda bahwa pembicara ingin mengarahkan fokus audiens pada argumen utama yang ingin ditekankan, yakni tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Selain itu, frasa *"bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar"* digunakan sebagai legitimasi moral, bahwa tindakan dan kebijakan yang beliau ambil termasuk terkait larangan wisuda sekolah didasarkan pada kepentingan publik, bukan sekadar kehendak pribadi.

Dari sisi struktur kalimat, pernyataan ini tersusun dalam dua kalimat pendek yang saling berkaitan secara makna. Kalimat pertama berupa pernyataan sikap yang lugas dan final *"Saya tidak akan mendengar siapa pun"*. Kalimat kedua memperkuat dan membenarkan sikap tersebut melalui alasan normatif: *"Yang*

*penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar”.*

## **2) Analisis Praktik Diskursif**

Analisis ini menggunakan dimensi yang kedua dalam teori Norman Fairclough, yaitu analisis praktik wacana, yang mengkaji bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, termasuk siapa aktor-aktor yang terlibat dan kepentingannya.

### **Produksi Teks**

Pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan tradisi wisuda sekolah disampaikan melalui media sosial, khususnya platform Instagram dan TikTok, di mana ia secara aktif membagikan pandangannya kepada publik. Dedi Mulyadi memproduksi teks dengan gaya komunikatif yang populis dan dekat dengan masyarakat, menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Produksi wacana ini tidak bersifat netral, tetapi sarat dengan nilai-nilai ideologis, yakni kritik terhadap budaya konsumtif dan komersialisasi pendidikan.

### **Distribusi Teks**

Pernyataan-pernyataan ini didistribusikan secara digital, melalui:

- 1) Kanal media sosial pribadi milik Dedi Mulyadi (YouTube, Instagram, TikTok).
- 2) Media daring seperti Kompas.com, MetroTVNews.com, Tempo.co, dll, yang mengutip atau mengangkat ulang pernyataan tersebut.
- 3) Forum diskusi online (komentar media) yang menjadi ruang penyebaran dan perdebatan opini publik.

Distribusi ini bersifat viral, karena didorong oleh engagement audiens yang tinggi. Dalam konteks ini, algoritma media sosial turut berperan dalam memperluas jangkauan wacana tersebut, menjadikannya konsumsi publik lintas kelas sosial dan usia.

### **Konsumsi Teks**

Teks dikonsumsi oleh beragam kelompok masyarakat, mulai dari orang tua, guru, pelajar, hingga pengamat pendidikan. Respon masyarakat terbagi dua: ada yang mendukung karena melihat wisuda sebagai beban biaya tambahan bagi keluarga, dan ada yang menolak karena menganggap wisuda sebagai simbol apresiasi bagi siswa. Dalam proses konsumsi ini, audiens tidak hanya pasif, melainkan turut memaknai, mendebat, dan memproduksi ulang makna wacana melalui kolom komentar, diskusi daring, dan opini pribadi. Ini menunjukkan bahwa konsumsi teks bersifat aktif dan kritis, tidak hanya pasif, tergantung pada latar belakang sosial dan posisi audiens dalam struktur masyarakat.

Aktor dan Kepentingannya:

1. Dedi Mulyadi  
Sebagai produsen wacana, Dedi Mulyadi menyuarakan pandangan populis yang menolak wisuda sekolah karena dianggap membebani rakyat kecil. Ia memosisikan diri sebagai pembela kepentingan ekonomi masyarakat, dengan gaya komunikasi otoritatif dan langsung melalui media sosial.
2. Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan Dasar)  
Sebagai representasi institusi pendidikan, Abdul Mu'ti menolak pelarangan wisuda secara sepihak. Ia menekankan bahwa wisuda boleh dilakukan selama

tidak berlebihan dan mendapat persetujuan orang tua. Kepentingannya adalah menjaga nilai simbolik wisuda sebagai bentuk syukur dan penguatan hubungan sekolah-orang tua, sekaligus menghindari praktik yang membebani.

3. Siswi SMA Penentang Kebijakan

Sebagai konsumen kritis, siswi SMA yang berdebat dengan Dedi Mulyadi menghadirkan wacana tandingan. Ia menekankan pentingnya wisuda sebagai bentuk apresiasi atas capaian belajar. Kepentingannya berakar pada hak siswa untuk mendapatkan penghargaan simbolik dari proses pendidikan.

**3) Analisis Praktik Sosiokultural**

Dalam analisis praktik sosiokultural menurut Fairclough, wacana dipahami dalam kaitannya dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan wisuda sekolah tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial masyarakat Indonesia yang kompleks, khususnya berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, budaya konsumtif, dan arah kebijakan pendidikan saat ini.

Dari aspek sosial, tradisi wisuda yang dulunya sederhana kini berubah menjadi kegiatan yang memerlukan biaya besar. Wisuda tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, tetapi juga di tingkat TK, SD, hingga SMA, dengan biaya yang kerap menjadi beban bagi orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pernyataan Dedi Mulyadi dapat dilihat sebagai bentuk kritik terhadap praktik ini, yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan utama pendidikan. Dalam konteks budaya, wisuda mengalami pergeseran makna. Dari yang semula hanya seremoni penutupan masa belajar, kini wisuda sering dijadikan ajang prestise dan pencitraan, terutama di media sosial. Hal ini mencerminkan budaya konsumtif dan gaya hidup yang berorientasi pada penampilan. Kritik yang disampaikan Dedi Mulyadi mencerminkan kekhawatiran terhadap perubahan nilai dalam budaya pendidikan yang semakin jauh dari substansi. Secara politik, pernyataan tersebut juga menunjukkan posisi Dedi Mulyadi sebagai figur publik yang ingin menampilkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Wacana penghapusan wisuda dapat dipahami sebagai bagian dari sikap politik yang berpihak kepada keadilan sosial dan penolakan terhadap praktik pendidikan yang dianggap tidak inklusif atau menambah beban masyarakat. Dari perspektif ekonomi, pelaksanaan wisuda telah menjadi bagian dari praktik komersialisasi pendidikan. Sekolah sering bekerja sama dengan penyedia jasa seperti event organizer, penyewaan busana, dan tempat acara, sehingga menjadikan wisuda sebagai kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses dan biaya yang tidak merata di kalangan peserta didik. Adapun dampak terhadap struktur sosial, wacana ini memunculkan perdebatan publik mengenai makna dan fungsi wisuda dalam sistem pendidikan. Ada pihak yang mendukung wisuda sebagai bentuk penghargaan atas capaian belajar, namun ada pula yang menganggapnya sebagai beban yang tidak perlu. Perdebatan ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan tidak hanya soal teknis pengajaran, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

## **Pembahasan**

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan Dedi Mulyadi mengenai penghapusan wisuda sekolah merepresentasikan relasi kuasa, resistensi terhadap simbolisme pendidikan, serta kritik terhadap praktik pendidikan yang sarat dengan beban ekonomi. Temuan ini sejalan dengan karakteristik Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough, yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kekuasaan (Fairclough, 1989 dalam Sumarti, 2010).

Dalam dimensi analisis teks, pernyataan Dedi Mulyadi memperlihatkan penggunaan kata-kata yang tegas, otoritatif, dan langsung. Penemuan ini memperkuat argumen dari Riza dan Fauziah (2025), yang menunjukkan bahwa bahasa dalam teks pendidikan sering digunakan untuk mereproduksi struktur kekuasaan yang mendukung otoritas tertentu. Dengan demikian, pemilihan kata dalam wacana Dedi Mulyadi menunjukkan bagaimana kekuasaan diekspresikan secara simbolik melalui bahasa, yang dalam hal ini berfungsi sebagai cara untuk mendukung dan membenarkan kebijakan serta nilai-nilai tertentu agar diterima oleh masyarakat.

Pada dimensi praktik wacana, produksi wacana oleh Dedi Mulyadi dilakukan melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, yang menjangkau khalayak luas dan memungkinkan respons spontan masyarakat. Distribusi wacana yang masif melalui media daring dan keterlibatan audiens dalam ruang komentar mencerminkan bahwa proses produksi dan konsumsi teks bersifat interaktif dan tidak sepihak. Hal ini selaras dengan temuan Urfa dan Asrofah (2024), yang menunjukkan bagaimana wacana kebijakan pendidikan dalam media tidak hanya disebarkan oleh otoritas, tetapi juga dikonstruksi ulang oleh publik sesuai dengan latar sosial masing-masing. Sebagaimana dijelaskan Fairclough, produksi dan konsumsi wacana melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dalam kasus ini, Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai representasi masyarakat bawah yang menolak komersialisasi pendidikan, sementara figur seperti Abdul Mu'ti dan siswi SMA berperan sebagai aktor wacana tandingan. Dinamika ini menunjukkan bahwa wacana pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dinegosiasikan dalam ruang sosial yang luas (Barus et al., 2023).

Pada dimensi praktik sosiokultural, pernyataan Dedi Mulyadi dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap dominasi simbolik dalam dunia pendidikan. Wisuda, yang semula hanya dimaknai sebagai penanda kelulusan, kini berubah menjadi simbol status sosial di masyarakat. Hal ini sesuai dengan gagasan Pierre Bourdieu tentang kekuasaan simbolik, yaitu bagaimana simbol atau tradisi tertentu digunakan untuk menunjukkan posisi atau kelas sosial seseorang. Dalam hal ini, larangan wisuda yang disampaikan Dedi Mulyadi mencerminkan upaya untuk mengkritisi praktik pendidikan yang lebih menonjolkan penampilan dan beban biaya, daripada makna belajar itu sendiri. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Kurniawan et al. (2021), yang menyebutkan bahwa wacana pendidikan di media sering kali tidak netral, tetapi dipengaruhi oleh ideologi dominan dan kepentingan kelas tertentu. Pernyataan Dedi Mulyadi secara terbuka menentang pandangan yang menjadikan wisuda sebagai simbol sosial, dan justru menawarkan pandangan alternatif yang lebih berpihak kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa wacana penghapusan wisuda bukan semata-mata pernyataan kebijakan, tetapi merupakan ekspresi ideologi yang merepresentasikan ketimpangan sosial, resistensi terhadap budaya konsumtif, dan perebutan makna dalam praktik pendidikan. Hal ini selaras dengan pandangan Fairclough bahwa wacana memiliki relasi dialektis dengan struktur sosial, ia membentuk dan dibentuk oleh kondisi sosial, politik, dan budaya tempat ia berkembang (Hamdan, 2019).

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kajian analisis wacana kritis terhadap pernyataan Dedi Mulyadi tentang penghapusan acara wisuda sekolah bukan sekadar mencerminkan keputusan teknis semata. Lebih dari itu, pernyataan tersebut merepresentasikan suatu bentuk ideologi yang berusaha menantang dominasi simbolik dalam sistem pendidikan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fairclough yang menyatakan bahwa wacana memiliki hubungan timbal balik dengan struktur sosial, di mana wacana tidak hanya dibentuk oleh kondisi sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk realitas sosial itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hamdan, H. (2019). Wacana dalam Perspektif Norman Fairclough. *Komodifikasi*, 7(1).
- Kurniawan, M. J., Mardikantoro, H. B., & Santoso, B. W. J. (2021). The Textual Discourse Analysis of Educational News on Kompas. com and Tempo. co in the Perspective of Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 10(1), 9-17.
- Urfa, R., & Asrofah, A. (2024). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap Berita Pembatalan Uang Kuliah Tunggal di Media Massa. *Metonimia: Jurnal Sastra dan Pendidikan Kesusastraan*, 2(3), 194-197.
- Riza, U., & Fauziah, N. (2025). Kritik ideologis narasi sejarah orde baru: Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada buku teks IPS kelas IX. *Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 10(2), 154-170.
- Sumarti, E. (2010). Analisis wacana kritis: Metode analisis dalam perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Bahasa Lingua Scientia*, 2(2), 157-167.
- Barus, E. S. B., Manik, J. C., Siahaan, L. S., Nuraini, N., & Lubis, F. (2023). ANALISIS WACANA KRITIS MODEL NORMAN FAIRCLOUGH PADA LAMAN BABAD. ID TENTANG PERGANTIAN KE KURIKULUM MERDEKA. *IdeBahasa*, 5(1), 111-118.
- Machin, D., & Mayr, A. (2012). *How to do critical discourse analysis: A multimodal introduction*. Sage Publications.